

SKRIPSI

**Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba Cambang
Di Kabupaten Pangkep**

Disusun dan diusulkan oleh :

Nama : Zul Fadli

Nomor Stambuk : 105640199514



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2019


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba Cambang Di Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : ZUL FADLI
Nomor Stambuk : 105640199514
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

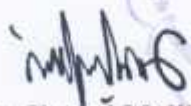

Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0013/FSP/A.3-VIII/1/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu Tanggal 28 Februari 2019.



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

1. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zul Fadli

Nomor Stambuk : 105640199514

Program Study : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 18 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Zul Fadli

ABSTRAK

ZUL FADLI, 105640199514, Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba Cambang Di Kabupaten Pangkep. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. Pembimbing Anwar Parawangi dan Rudi Hardi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang dalam memberikan dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Pangkep. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Objek wisata Pulau Camba-Cambang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten pangkep, dengan menggunakan teori management menurut Sarina dan Mardalena. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dari objek wisata Pulau Camba-Cambang dalam proses perencanaan yaitu sebagai gerbang wisata dan pusat kegiatan wisata bahari. Bentuk pengorganisasian yaitu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep. Pada tahap pengarahannya, Kepala dinas memegang peran penting dalam proses komunikasi dengan seluruh *stakeholders*, dan pada tahap pengendalian dilakukan dengan cara evaluasi terkait pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang.

Kata Kunci : Tata Kelola, Objek Wisata, Management

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunianya semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul “Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba Cambang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pangkep” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar serjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Ansyar B.A (Almarhum) dan Ibunda tercinta Hariyati yang telah membesarkan penulis dan atas doa tulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian dalam mendidik serta membesarkan penulis. Serta kakak dan adik tercinta.

2. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak_Rudi Hardi S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terimah kasih kepada teman-teman di Lingkar Bambu yang telah membantu memberikan saran dan support kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 terkhusus seluruh teman-teman IP D 2014 dan seluruh pihak yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kaki di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi

penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin! Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 Februari 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tata Kelola.....	7
1. Definisi Tata Kelola	7
2. Tahapan Tata Kelola	9
3. Tata Kelola dalam Konteks Pariwisata	12
B. Konsep Objek Wisata Pulau.....	15
C. Kerangka Pikir	21
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Peneliti.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisa Data.....	28
G. Pengabsahan Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
B. Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba-Cambang	48
1. Perencanaan.....	48
2. Pengorganisasian.....	55
3. Pengarahan	58
4. Pengendalian	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Program Pengembangan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya	37
TABEL 4.2 Fasilitas Objek Wisata Pulau Camba-Cambang	42
TABEL 4.3 Pendapatan Restribusi Pariwisata Kabupaten Pangkep	46
TABEL 4.4 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pulau Camba-Cambang	47
TABEL 4.5 Pendapatan Restribusi Pulau Camba-Cambang	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai macam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan baik di daratannya maupun lautnya yang didukung dengan keanekaragaman budaya Indonesia yang menggambarkan sejarah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa yang beraneka ragam tersebar dari sabang sampai merauke. hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata.

Menurut I Gusti Bagus Rai Utama (2016) kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata

tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja di masyarakat (Dewi Kusumasari Sari, 2011).

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut dibidang pariwisata dapat dilihat dari keterbukaan peluang usaha dan jasa seperti penyediaan sarana pariwisata, usaha biro perjalanan, jasa transportasi, jasa pramuwisata, penyediaan akomodasi, usaha jasa penyediaan makanan serta minuman dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan dalam kebutuhan industri pariwisata berdasarkan tata kelola yang baik, sehingga peluang peningkatan roda perekonomian di daerah yang dijadikan sebagai tempat objek wisata menjadi beraneka ragam dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi industri pariwisata bahari yang dapat di kelola dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal terdapat di Kabupaten Pangkep. Adapun luas laut yang dimiliki yaitu 11.464.44 km² dengan luas potensi penyebaran terumbu karangnya yaitu 36.000 ha dan 35.150 ha luas suatu pulau-pulau kecil juga memiliki garis pantai sepanjang 250 km, adapun daerah Kabupaten Pangkep memiliki 4 kecamatan di wilayah pulau dan 7 kecamatandidaerah pesisir dengan jumlah pulau 112, dimana 94 diantaranya berpenduduk.

Sebagai daerah yang tergelong memiliki wilayah laut yang luas dan jumlah pulau yang mencapai 112 pulau, berdasarkan hal tersebut, perlu suatu

pertimbangan dalam melihat potensi pengembangan di sektor wisata bahari dalam kaitannya pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki daerah dengan melihat dan mempertimbangkan pemeliharaan dan perlindungan dengan maksud dapat membuka sebuah peluang usaha bagi masyarakat yang berada di kepulauan. Proses atau cara memperbanyak potensi sumber pendapatan menjadi jalan yang logis ditengah rendahnya pendapatan nelayan disebabkan ikan yang makin susah didapatkan dan juga pengaruh perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi oleh para nelayan (Heriansah dan Fathuddin, 2014:37).

Terkait proses pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah membangun destinasi pariwisata bahari dengan mengembangkan Pulau Camba-Cambang sebagai objek wisata. Pembangunan objek wisata Pulau Camba-Cambang merupakan program pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata.

Objek wisata Pulau Camba-Cambang merupakan implementasi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang salah satu tujuannya yaitu Menciptakan kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan sebagai destinasi unggulan yang berbasis kepada wisata bahari dan ekowisata pada tingkat regional dan nasional. Dimana arah pengembangannya diarahkan untuk kegiatan rekreasi umum serta pengembangan yang dilakukan berbasis kepada masyarakat.

Sejalan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1, yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Adapun proses pengerjaan Pulau Camba-Cambang dimulai pada tahun 2012, dimana dalam pembangunannya dapat diselesaikan dan diresmikan pada tanggal 23 november 2015, untuk pelaksanaan dari penerapan biaya karcis untuk masuk ke Pulau Camba Cambang baru dapat terlaksana pada tahun 2016. Adapun jumlah pengunjung dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 sebanyak 13.929 orang pengunjung dan pada tahun 2017 turun dengan jumlah 9601 orang pengunjung.

Terkait dengan penurunan jumlah pengunjung tersebut menjadi permasalahan tersendiri, jika dilihat dari letak Pulau Cambang-Cambang yang mudah diakses karena tidak terlalu jauh dari Pelabuhan terdekat, dimana jarak tempuh hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit dengan menggunakan transportasi laut. Pulau Camba-Cambang pun telah memiliki fasilitas penunjang bagi para pengunjung, dimana terdapat penginapan, gazebo, aula, rumah ibadah, waterboom, minimarket, fasilitas olahraga dan lain-lain.

Untuk menuju ke Pulau Camba-Cambang pengunjung dapat menggunakan kapal nelayan yang berada di Pelabuhan Maccini Baji Kecamatan Labakkang yang berkapasitas 7 sampai 8 orang dengan tarif Rp.150.000 sampai Rp.200.000 setiap sekali jalan. Sehingga dari latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba-Cambang Di Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan oleh penulis maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini terkait bagaimana bentuk tata kelola pemerintah daerah terkait pemanfaatan pulau menjadi objek wisata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, yakni :

1. Untuk mengetahui bentuk tata kelola objek wisata pulau dalam memanfaatkan bentuk sebuah potensi yang dimiliki suatu daerah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap tata kelola sebuah program pemerintah dalam melihat celah atau potensi yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk suatu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari sebuah hasil yang bisa memperkaya kajian tentang tata kelola pariwisata, pada hal ini kajian mengenai membangun daerah dengan tata kelola objek wisata yang dimiliki daerah atau pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola

1. Definisi Tata Kelola

Menurut Clarke (dalam Dwita Darmawati, 2017:102), mendefinisikan tata kelola sebagai suatu sistem memberi petunjuk dan melakukan pengawasan korporasi bisnis. Susunan tata kelola mengatur penyaluran hak serta tanggung jawab di tengah-tengah partisipan yang berbeda di dalam organisasi. Serta di dalam tata kelola juga terdapat sebuah aturan dan prosedur dalam mengambil sebuah keputusan.

Adapun definisi tata kelola dari beberapa ahli yang memberikan gambaran terkait tata kelola telah dirangkum dalam process Definition and Framework yang ditulis oleh Paim dan Flexa (dalam Dicky Rutanaji dkk, 2017:169) antara lain sebagai berikut :

- a. Tata kelola diartikan sebagai suatu instrument dalam menjamin sebuah desain, proses, serta strategi untuk bekerja dengan berjalan sesuai dengan semestinya yang diperuntukkan dalam memastikan terjadinya sebuah keselarasan ketiga hal tersebut.
- b. Tata kelola diartikan sebagai suatu bentuk kebutuhan dalam memastikan hubungan diantara suatu proses prakarsa yang berasal dari unit-unit fungsional yang tidak sama dan juga digunakan untuk membangun hubungan dalam

kaitannya memberikan sebuah keselarasan antara proses dan juga strategi dalam organisasi

- c. Tata kelola diartikan sebagai suatu cara dalam penggunaannya dalam membererikan definisi terkait seperangkat aturan yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana di dalam sebuah organisasi harus melaksanakan fungsi sebuah bisnis yang khusus.

Adapun pemahaman Menurut Terry (dalam Resky Sirupang Kanuna, 2014:25), menjelaskan bahwa pengelolaan (*management*) adalah suatu proses yang memiliki ciri tersendiri atau kekhasannya yang terjadi dari sesuatu yang dilakukan terkait sebuah perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan yang dikerjakan guna menentukan dan memperoleh suatu target-target yang telah diputuskan melalui suatu proses pemanfaatan suatu sumber daya manusia juga berasal dari sumber-sumber yang lain.

Adapun kata dari *management* merupakan kata benda yang berasal atau bersumber dari Bahasa Inggris dan telah di Indonesiakan menjadi manajemen, yang memiliki pengertian penggunaan suatu sumber daya yang dapat efektif juga efisien guna mencapai sebuah sasaran. Sebagian dari masyarakat juga telah memahami bahwa suatu manajemen sama halnya dengan sebuah pengelolaan yang merupakan proses dari sistem perbuatan mengelola (Bambang Suharto, 2011:37).

Definisi manajemen lain yang secara luas digunakan dalam buku ajar manajemen ialah definisi Mary Parker Follet (dalam Ulber Silalahi, 2015:4), yang mengatakan: "*management is the art of getting things done with other things done*

with and through other people.” Definisi ini memiliki dua makna, yaitu: “*getting things done through other people*” atau mencapai sesuatu “bekerja bersama” orang lain dan “*getting things done through other people*” atau mencapai sesuatu “bekerja melalui” orang lain.

2. Tahapan Tata Kelola

Dalam suatu pengelolaan atau manajemen memiliki sebuah proses tentang pelaksanaan perencanaan tata kelola, pengorganisasian, sebuah penyusunan, pengarahan, tentang pengendalian dan juga pengawasan terkait sebuah pemakaian sumber daya dari organisasi baik dari sumber daya manusia, juga sumber dana ataupun segala sumber daya yang lainnya guna mencapai sebuah tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan (Laradu dkk, 2012:168).

Menurut Sarina dan Mardalena (2012) mengartikan suatu tata kelola atau manajemen sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Adapun proses atau tahapan yang dimaksud yaitu :

- a. Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi
- b. Pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi

yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

- c. Pengarahan merupakan suatu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d. Pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo, 2017:23) yaitu: 1) Perencanaan; 2) Pengorganisasian; 3) Pengarahan; 4) Pengkoordinasian; 5) Pengkomunikasian; dan 6) Pengawasan.

- a. Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, dimana dan bagaimana dilaksanakannya.
- b. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antarpersonal, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan

memperoleh Pengambilan Kebijakan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok, (b) membagi tugas manager dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

- c. Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.
- d. Pengkoordinasian adalah suatu usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, mensekresikan mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.
- e. Pengkomunikasian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas mencapai tujuan bersama.
- f. Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan sering juga disebut kontrol, penilaian, penilikan, monitoring, supervisi dsb. Tujuan utama pengawasan adalah agar dapat diketahui tingkat pencapaian

tujuan dan menghindarkan terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dapat diartikan sebagai pengendalian.

3. Tata Kelola dalam Konteks Pariwisata

Definisi dari tata kelola pariwisata ialah mekanisme pengelolaan kolaboratif pariwisata yang melibatkan sektor pemerintah dan non pemerintah dalam suatu usaha kolektif. menurut Dewi (dalam Handini Widiyanti, 2016 :7), sebuah tata kelola dengan baik diperlukan untuk membangun dan menata struktur dan proses pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab yang bias membuka , memfasilitasi, dan menyediakan peluang dan forum dialog yang bersifat konstruktif, berbagai informasi, berkomunikasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk berbagai masalah.

Menurut Firman, Teguh (dalam Slamet Riyadi, 2012:527), dari kenyataan yang ada sebuah praktik dari tata kelola konteks pariwisata membangun berbagai macam upaya dalam meningkatkan kualitas dari sebuah pengelolaan serta daya saing pada suatu daerah yang dimanfaatkan sebagai tempat tujuan pariwisata. Yang menyebabkan rendahnya sebuah kualitas dari pengelolaan daerah yang menjadi tempat tujuan pariwisata yang dapat dinilai dari suatu bentuk kinerja tata kelola yang dalam penerapannya tidak berlangsung secara baik disebabkan besaran dari perolehan suatu pariwisata yang tergolong masih rendah.

Dari penjelasan tata kelola pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya suatu bentuk tata kelola dalam konteks kepariwisataan yang memiliki sistem pengelolaan yang efektif adalah dengan adanya hubungan koordinasi serta

sinkronisasi dari program para pengelola atau pihak penyelenggara yang memiliki kepentingan dan juga keterlibatan partisipasi yang aktif dari Dinas Pariwisata, Swasta atau pihak industri pariwisata, dan juga masyarakat sekitar guna memberikan sebuah pelayanan yang baik bagi wisatawan, yaitu dengan menyediakan berbagai macam penunjang kebutuhan wisatawan (Rizki Andini Herat, 2015:6).

Keberadaan sektor pemerintah dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah, masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (Mauizatul Hasanah, 2017:25).

Menurut Muntasib et al. (dalam Handini Widiyanti 2016:7), menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata merupakan suatu bentuk hubungan antara pelaku pariwisata, konsumen pariwisata, pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki sebuah hubungan terkait pariwisata. Tata kelola tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Banyak aktor/pelaku yang terlibat dan tidak ada pelaku yang sangat dominan untuk menentukan gerak aktor/pelaku lainnya.

- b. Arah gerak pariwisata alam ditentukan bersama.
- c. Tata kelola pariwisata alam diakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Hal ini juga untuk merespon atas dinamika multilinear perkembangan pariwisata pada sekarang ini.
- d. Sektor pariwisata terdapat kompleksitas relasi antar pihak dan keragaman pelaku terkait sumber daya alam dan budaya untuk sebuah wisata.
- e. Sisi permintaan juga berkembang keragaman permintaan sehingga perlu disiapkan perencanaan yang memahami trend dunia, sekaligus mampu membuat inovasi sebagai sesuatu yang unik dan khas Indonesia.

Pengelolaan pariwisata harus didasarkan pada perencanaan yang matang, perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata berarti untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang, oleh karena itu, kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus di masukkan kedalam perencanaan tersebut, selain itu kualitas sumber daya pengelola pariwisata juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri pariwisata tersebut, sebab dalam mengelola pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman seperti dikemukakan oleh Salim (dalam Kartika Widyasmi, 2012:19) bahwa “beberapapun banyak modal yang dimiliki, pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal itu untuk pembangunan”.

B. Konsep Objek Wisata Pulau

Objek wisata yaitu suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya dimana sumber daya yang dimaksud adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta budaya suatu bangsa serta objek atau sebuah tempat yang terdapat potensi untuk menarik daya tarik pengunjung dengan keadaan alam yang memberikan sebuah ruang interaksi sesama manusia (Hugo Itamar, 2016:15).

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya, baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Objek wisata dipahami sebagai gejala kepergian orang-orang di dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyeberangan orang-orang pada tapal batas suatu negara (pariwisata internasional). Selanjutnya proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi dan hubungan, saling pengertian insani, perasaan, persepsi, motivasi, tekanan, kepuasan, kenikmatan antar sesama pribadi atau antar kelompok. Menurut Fandeli, objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan (dalam Hugo Itamar, 2016:13), yaitu:

1. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan.
2. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk.
3. Yang menjadi sasaran utama adalah wisatawan.

Menurut Bangen *et al.* (dalam Kismanto Koroy dkk, 2017:2), mendefinisikan pulau kecil yang memiliki suatu ciri-ciri sebagai bentuk suatu sumber daya alam seperti, ukuran dari suatu pulau yang tergolong kecil dan juga terpisah dengan pulau inti atau pulau yang berukuran besar, sumber daya yang berupa air tawar sangat terbatas, mudah dan rawan terkenah pengaruh eksternal, keanekaragaman hayati yang dimiliki berkenaan dengan daratannya rendah, namun terdapat beberapa jenis endemic, keanekaragaman hayati dari laut yang juga tinggi, bentuk perebuhan iklim yang kecil, dan memiliki luas laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya dan juga tidak memiliki *hinterland* yang jaraknya jauh pada pantai.

Menurut Lewaherilla (dalam Ahmad Nawawi, 2013:105) berpendapat bahwa wisata bahari adalah pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Wisata bahari adalah bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai sebagai daya tarik utama. Bentuk wisata bahari dapat bermacam-macam sesuai karakteristik pantai dan lingkungan sosial budaya yang ada di lingkungan pantai. Kawasan wisata yang baik dan berhasil jika secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu:

1. Mempertahankan kelestarian lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;
3. Menjamin kepuasan pengunjung;
4. Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan pengembangannya.

Dalam dunia kepariwisataan, segala hal yang memiliki nilai dan mempunyai daya tarik untuk dikunjungi serta dilihat, disebut sebagai atraksi atau hal lazim dinamakan sebagai objek wisata. Suatu objek wisata merupakan segala hal yang memiliki bentuk daya tarik, sebuah keunikan dan juga nilai tinggi, sehingga menjadi sebuah tujuan oleh para wisatawan datang berkunjung ke tempat objek wisata (Dhani Eko Setyo Purnomo, 2013:19).

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu system yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, politik, social, budaya, dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai suatu system, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bias dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (interconnectedness). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Dalam

sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, (3) pemerintah (Deddy Prasetya Maha Rani, 2014:414).

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat disekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, dan juga devisa bagi suatu Negara.

Objek serta daya tarik wisata adalah sebuah unsur yang paling penting di dalam suatu kepariwisataan. Sebuah objek serta daya tarik wisata merupakan bentuk yang dapat memberikan kesuksesan terhadap sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga adat serta budaya dari suatu bangsa yang dijadikan asset yang memiliki nilai jual terhadap para wisatawan. Objek wisata merupakan segala sesuatu yang dapat bernilai untuk dikunjungi, serta mempunyai daya Tarik tertentu. Baik dari sudut pandang keunikan serta nilai tinggi yang menjadi tujuan wisata untuk mengunjungi daerah tersebut (Lusita Anjelina, 2017:21).

Ada 3 (tiga) bentuk karakteristik yang utama dari suatu objek wisata yang perlu diperhatikan dalam suatu upaya dari pengembangan sebuah objek wisata tertentu guna menarik serta dapat dikunjungi wisatawan yang banyak (dalam Dhani Eko Setyo Purnomo, 2013:20), antara lain :

1. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai *something to see* yang memiliki arti suatu tempat harus terdapat objek wisata serta atraksi suatu wisata yang memiliki keunikan tersendiri
2. Daerah tersebut harus memiliki apa yang dinamakan dengan *something to do* yang berarti tempat itu selain banyak yang bisa disaksikan, harus disediakan pula fasilitas reaksi yang berguna memberikan kenyamanan terhadap wisatawan sehingga memberikan ketenangan bagi wisatawan.
3. Daerah tersebut harus memiliki apa yang dinamakan dengan *something to buy* yang memiliki arti yaitu tempat itu harus memiliki sebuah fasilitas dalam berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari sebuah pengembangan destinasi pariwisata yang memanfaatkan potensi yang dimiliki dari suatu pulau-pulau kecil sehingga dapat memberikan sebuah gambaran dalam memanfaatkannya (dalam Krishna Samudra dkk, 2017:15) meliputi:

1. Prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan konservasi.
2. Prinsip melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

3. Prinsip konservasi.
4. Prinsip perpaduan dengan memperhatikan suatu ekosistem dari pulau luar serta disinerjikan terhadap pembangunan dalam berbagai sektor.
5. Prinsip dari penegakan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam menjamin kepastian hukum.

Kondisi sebuah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni secara logika memiliki kegunaan dalam memberikan kualitas dari keindahan serta keaslian dari *biodiversity* yang dimilikinya, jadi sangat menarik guna dikembangkan menjadi ekowisata bahari, contohnya diving dan snorkeling. Melihat peluang serta potensi dari wisata bahari di Indonesia yang kini semakin pesat dalam berkembang, menurut Dahuri (dalam Kismanto Koroy dkk, 2017:2), potensi tersebut yang dimiliki saat ini belum juga sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional.

Gugusan dari suatu pulau-pulau kecil merupakan kumpulan dari pulau-pulau secara fungsional ini saling berhubungan dari sisi suatu ekologis, ekonomi, social, serta budaya, baik itu secara individu maupun berbentuk sinergis yang dapat memberikan peningkatan terhadap skala ekonomi yang berasal pengelolaan suatu sumber daya. Pulau pulau kecil memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Potensi dari suatu pulau-pulau kecil dari aspek keanekaragaman hayati, keindahan dari panorama suatu alam serta budaya yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan pariwisata (Riani Nurjanah, 2012:144).

C. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai “Tata Kelola Objek Wisata Pulau dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep)”. Dari penjelasan yang ada maka bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengenai tata kelola objek wisata pulau dalam pengembangan ekonomi lokal studi kasus pada Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep, dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada bentuk tata kelola yang berdasarkan pada tahap-tahap tata kelola, yaitu perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan, dan pengendalian terhadap objek wisata pulau

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi
- b. Pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengarahan merupakan suatu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

- d. Pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, memakan waktu 2 bulan dimulai dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 4 oktober 2018. Adapun lokasi dari penelitian ini berada pada aspek yang memiliki pengaruh bagi objek penelitian yang dilakukan. Menetapkan suatu lokasi penelitian adalah tahap yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi proses penelitian.

Karena dalam penetapan suatu lokasi objek yang akan diteliti secara garis besar telah menetapkan tujuan utama dalam suatu penelitian sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep dan wilayah Pulau Camba-Cambang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Menurut Sukmadinata (dalam Bachtiar S. Bachri, 2010:50) Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu: 1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan 2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai itulah maka penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data yang sesuai dengan tujuannya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu merupakan bentuk sebuah penelitian yang memiliki sebuah tujuan yang memberikan sebuah gambaran secara umum tentang berbagai macam data yang diperoleh dari lapangan mengenai keadaan yang sebenarnya, adapun dasar dari penelitian ini yakni survei, merupakan sebuah tujuan dari penelitian secara deskriptif yakni memberikan gambaran tentang keadaan-keadaan atau sebuah peristiwa secara sistematis, faktual dan juga akurat (La Radu dkk, 2012:169).

C. Sumber Data

Adapun sumber data merupakan seluruh yang mampu memberikan sebuah informasi terkait data. Dilihat dari sumber data dapat dibedakan berdasarkan dua bentuk data, antara lain data primer dan juga data sekunder (dalam Siti Nila Rokhmana, 2012:49) antara lain sebagai berikut :

1. Suatu data primer merupakan bentuk data yang dikerjakan oleh peneliti dengan maksud terkhusus dalam memberikan suatu pemecahan masalah yang sedang diteliti. Data merupakan hasil dari pengumpulan yang dilakukann sendiri dalam

hal ini peneliti mengumpulkan data langsung dari informan di tempat dilakukannya penelitian ini sesuai dengan sumber dan jumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Adapun pada data sekunder merupakan bentuk data yang sudah di rangkum dalam kaitannya memberikan solusi dari permasalahan yang diteliti, sumber pengambilan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu pengambilan datanya bersumber pada bukku, jurnal, artikel serta berbagai macam literature lainnya yang membahas keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan guna memberikan landasan secara teoritis dalam penelitian.

D. Informan Peneliti

Pemilihan informan penelitian adalah dengan menggunakan prosedur *purposive*, yaitu suatu cara atau strategi untuk menentukan informan secara umum dari bentuk penelitian kualitatif. Yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteriater terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Qaharuddin Tahir, 2014:187).

Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan dalam memperoleh sebuah informasi dapat menggunakan teknik *snowball* yang merupakan suatu bentuk atau cara penentuan informan yang terlebih dahulu menentukan informan yang menjadi kunci dalam penelitian dan selanjutnya memberikan rekomendasi nama untuk dijadikan informan dalam proses menemukan informasi yang dirasa belum terlalu menjawab permasalahan penelitian dari informan sebelumnya. Dalam menentukan informan yang dianggap memenuhi informasi jika telah mencapai pada sebuah

taraf “*redundancy*” atau telah berlebihan, artinya jika telah menambah informan lantas tidak memberikan suatu informasi yang memperkaya dalam suatu penelitian maka peneliti dapat menghentikan terkait permasalahan tersebut (Anis Masruri, 2016:8).

Informan adalah seseorang yang memiliki pemahaman ataupun terlibat langsung dari sebuah masalah yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Adapun informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian yang akan dilakukan ini, sebagai informan yaitu:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep
- Camat Liukang Tupabbiring Utara
- Tokoh masyarakat, dan
- Pengunjung

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif ini, maka peneliti merupakan instrumen penelitian. Riduwan (dalam Hasan Comce dkk, 2017:264) mengemukakan “metode pengumpulan data ialah cara ataupun sebuah teknik yang dapat digunakan dalam penelitian guna memperoleh sebuah data. Adapun bentuk teknik pengumpulan sebuah data yang digunakan yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Adapun teknik pengumpulan suatu data primer yang digunakan yaitu 1). Bentuk observasi partisipan (*participant observation*). 2). Wawancara secara

mendalam (*in depth interview*) 3). Dokumentasi. Sebuah bentuk teknik untuk memperoleh data yang merupakan langkah utama dalam suatu penelitian, dikarenakan dalam suatu penelitian merupakan suatu proses untuk memperoleh sebuah data. Dimana peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan suatu data, sehingga peneliti memperoleh data yang menjelaskan tentang informasi dari sebuah permasalahan yang diteliti (Anis Masruri, 2016:8).

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik memperoleh data ini dengan memanfaatkan sumber dari sebuah metode studi pustaka dan juga dokumentasi, adapun bentuk studi pustaka yang dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan sumber dari jurnal, artikel, maupun media tertulis tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dari penelitian yang diangkat. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data documenter (R. Erdianto Setyo Wahyono, 2012:8).

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis dari data yang digunakan terkait penelitian ini menggunakan sebuah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dimana suatu data yang berbentuk sebagai suatu informasi baik itu secara lisan maupun tulisan yang memiliki sifat yang bukan angka. Pengelompokkan suatu data dilakukan guna memberikan kemudahan untuk menyaring data yang dapat digunakan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah itu, pengelompokkan data sebelumnya penulis menjabarkan dalam bentuk sebuah teks agar dapat lebih mudah dipahami.

Untuk mempermudah berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan (dalam Suhardi 2016:30) antara lain :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi sebuah data adalah suatu bentuk proses pemilihan, pemusatan terkait perhatian pada sebuah penyederhanaan, dan transformasi data dari garis-garis besarnya yang muncul dari sebuah catatan di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis berikutnya yaitu sebuah penyajian (*display*) data. Penyajian suatu data yang diarahkan sehingga sebuah data dari hasil reduksi dapat tersusun dalam bentuk pola hubungan, agar dapat lebih mempermudah untuk dipahami dan bentuk penyajian suatu data dapat dibentuk dalam sebuah uraian naratif.
4. Menarik Kesimpulan (Verifikasi), sebuah kesimpulan adalah hal yang berdasarkan pada sebuah tinjauan terkait apa yang ada di lapangan berdasarkan pada catatan-catatan yang diperoleh, sehingga penarikan kesimpulan dalam hal ini verifikasi merupakan usaha dalam rangka memperoleh atau mendapatkan makna, keteraturan, pola, alur atau sebuah proposisi dan juga menghasilkan sebuah penjelasan.

G. Pengabsahan Data

Adapun teknik pengabsahan suatu data yang diperoleh dapat dipercaya dengan perpanjangan suatu pengamatan, me-ningkatkan ketekunan dan triangulasi (dalam Hardian Pamungkas Adi dkk, 2017:165) sebagai berikut :

1. Perpanjangan pe-ngamatan dilakuan oleh peneliti pada saat terjun ke lapangan melakukan observasi, wawancara awal atau de-ngan pendekatan sebagai *observer*. Setelah wawancara pertama telah di-lakukan, selanjutnya wawancara kedua dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pada permasalahan yang diteliti.
2. Adapun persoalan peningkatan ketekunan mempengaruhi hasil dari data yang dikumpulkan saat dalam pengamatan dapat memberikan hasil yang lebih baik dan peneliti dapat mengumpulkan data akurat dan tersusun secara sistematis tentang apa yang sedang dalam pengamatan.
3. menurut Yeasmin, S. dan Rahman, KF (dalam Hardian Pamungkas Adi dkk, 2017:165), menjelaskan bahwa triangulasi adalah suatu bentuk proses dari veryfikasi yang memberikan peningkatan validitasnya dari penggabungan beberapa sudut pandang dan metode. Adapun teknik triangulasi dari penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Objek Wisata Pulau Camba-Cambang

Nama Pulau Camba-Cambang berasal dari bahasa Makassar yaitu kata camba yang memiliki arti pohon asam, hal ini dilandasi karena dahulu pulau tersebut terdapat dua pohon asam yang tumbuh tinggi dengan dedaunan yang lebat dan kata cambang berasal dari pemaknaan dua pohon camba sebagai simbol sepasang suami istri yang dimana kata Cambang diidentikkan sebagai laki-laki, berawal dari situlah nama Pulau Camba-Cambang yang artinya pulau yang ditumbuhi pohon camba yang bercambang.

Pada zaman kerajaan Gowa dan Bone berkuasa, Pulau Camba-Cambang menjadi batas wilayah dari dua kerajaan tersebut, yang dimana jika kita berdiri menghadap ke barat di Pulau Camba-Cambang, maka pulau yang berada di sebelah kanan kita adalah pulau-pulau yang namanya berawalan Sa-, yaitu Pulau Saugi, Pulau Satando, Pulau Salemo, Pulau Sagara, Pulau Sabangko, Pulau, Sakuala, Pulau Sapuli, Pulau Sabutung, Pulau Samatellu, Pulau Sapuka, Pulau Salebbo, dan seterusnya, pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah Kerajaan Bone. Sedangkan pulau-pulau yang berada di sebelah kiri adalah pulau yang namanya berawalan Po-, yaitu Pulau Polo Kolambing, Pulau Polo Laiyya, Pulau

Polo Wali, Pulau Polo pala, Pulau Poko Ranrang, dan seterusnya, yang dimana pulau tersebut masuk pada wilayah Kerajaan Gowa.

Pulau Camba-Cambang sendiri merupakan wilayah dari Desa Mattiro Baji, Kecamatan Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dimana terdiri dari tiga dusun di ketiga pulau utama, yakni Pulau Satando, Pulau Saugi, Pulau Sapuli, sedangkan untuk Pulau Camba-Cambang merupakan pulau yang tidak berpenghuni.

Proses pengerjaan Pulau Camba-Cambang dimulai pada tahun 2012 yang memakan waktu 3 tahun proses pengerjaan, dimana dalam pembangunannya dapat diselesaikan dan diresmikan pada tanggal 23 november 2015. Pulau Camba-Cambang sendiri memiliki luas sekitar 1,5 hektare dan memiliki jarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Pangkep, adapun untuk mencapai Pulau Camba-Cambang dapat menaiki alat transportasi laut dari Dermaga Maccini Baji yang berada di Kecamatan Labakkang dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dan dari Dermaga Biring Kassi di Kecamatan Bungoro dengan waktu sekitar 20 menit.

Keberadaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang semakin dikenal dan diminati oleh para wisatawan membuat pemerintah Kabupaten Pangkep memberi perhatian yang serius dengan membangun sejumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk menjadikan Pulau Camba-Cambang sebagai objek wisata unggulan dan sebagai gerbang wisata bahari bagi kepulauan supermonde yang ada di Kabupaten Pangkep, hal tersebut ditunjang dengan keberadaan Dermaga

Maccini Baji dengan Dermaga Biring Kassi sebagai tempat akses menaiki transportasi laut menuju ke objek wisata Pulau Camba-Cambang.

2. Arah Kebijakan dan Pengembangan Objek Wisata Pulau Camba-Cambang

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, mencakup aspek pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Kebijakan pengembangan kepariwisataan merupakan pendekatan dari konsep yang dirumuskan yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangkep memiliki tiga arah kebijakan umum, yaitu :

1. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah.;
2. penegakkan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah.; dan
3. pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan kepariwisataan daerah, memberikan arah bagi perumusan rencana pengembangan kepariwisataan daerah, memberikan arah bagi perumusan strategi dan program pengembangan industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, serta sebagai dasar dalam perumusan perangkat pemantauan dan pengendalian kepariwisataan daerah.

Penunjang tingkat keberhasilan objek wisata dalam pengembangannya yaitu dengan memaksimalkan potensi daya tarik yang dimiliki sebuah objek wisata yang dimana masih mengoptimalkan daya tarik alam sebagai daya tarik yang utama dalam meningkatkan dan mengoptimalkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kebijakan pembangunan destinasi wisata Kabupaten Pangkep dalam hal daya tarik wisata memiliki empat arah pembangunan, antara lain :

1. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah.
2. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.
3. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
4. Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.

Dalam hal fasilitas umum, prasana umum, dan fasilitas pariwisata Kabupaten Pangkep merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, sehingga dalam penerapannya memiliki dua arah kebijakan, antara lain :

1. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Pangkep.
2. Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing kawasan pariwisata Kabupaten Pangkep.

Terkait aksesibilitas atau transportasi pariwisata yang menunjang daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung guna memberikan kemudahan untuk mencapai objek wisata yang berada di Kabupaten Pangkep. Adapun dalam menunjang hal tersebut tentang aksesibilitas atau transportasi pariwisata memiliki tiga arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
2. Pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
3. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Sebagai salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang dapat memberikan peningkatan perekonomian

masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pariwisata, dalam pengembangannya memiliki tiga arah, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
2. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.
3. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan utama selain kunjungan wisatawan yaitu sebuah investasi yang diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta perluasan lapangan kerja. Masuknya investasi ditandainya dengan meningkatnya industri pendukung kepariwisataan. Kebijakan pembangunan industri kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam mendukung investasi kepariwisataan Untuk arah kebijakan investasi pariwisata memiliki tiga arah kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan intensif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.
3. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Kawasan Pulau Camba-Cambang merupakan kawasan rekreasi air yang diarahkan untuk kegiatan rekreasi umum serta pengembangan yang dilakukan berbasis kepada masyarakat. Kawasan pengembangan pariwisata Camba-Cambang dan sekitarnya yang merupakan pengembangan ekowisata berbasis rekreasi ini

memiliki beberapa program pengembangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
PROGRAM PENGEMBANGAN PULAU CAMBA-CAMBANG
DAN SEKITARNYA

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan Kawasan Pariwisata Cambang-Cambang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata Bahari berbasis Rekreasi Marina	1.1 Pengembangan dan penambahan sarana transportasi wisata laut melalui makasar dan Pangkep				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perhubungan, dan kelautan
		1.2 Sosialisasi dan Koordinasi bersama masyarakat, LSM dan pengusaha di khususnya di pulau Badi, Pajenekang, dan Pulau Cambang-Cambang terkait rencana pembangunan pulau tersebut sebagai pusat distribusi pengunjung.				
		1.3 Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Pulau Cambang-Cambang dan Badi, sebagai daya tarik wisata rekreasi keluarga dan rekreasi air.				
		1.4 Pengembangan Paket-paket wisata bahari dan kepulauan melalui pemanfaatan 2 pintu distribusi pengunjung di makasar dan Pangkep.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.5 Pengembangan pola pengaturan pengunjung di dalam pemanfaatan wilayah kepulauan khususnya dalam pengembangan wisata rekreasi di kawasan ekowisata Cambang-Cambang				
		1.6 Penambahan dan Pengadaan sarana informasi dan interpretasi daya tarik wisata di Kawasan Pulau Badi dan Pulau Cambang-Cambang.				
		1.7 Peningkatan kegiatan konservasi dan budidaya kuda laut di kawasan Pulau Badi, melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak swasta dan penguruan tinggi setempat.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		1.8 Peningkatan kegiatan konservasi terumbu karang kawasan pulau Cambang-Cambang, Badi dan Pajenekang.				kepariwisataan , kelautan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		1.9 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem kawasan Pulau Cambang-Cambang yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.				

Sumber : RIPPDA Kabupaten Pangkep, 2014

Objek wisata Pulau Camba-Cambang sendiri merupakan implementasi rencana pengembangan wisata bahari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten pangkep dengan menjadikan Pulau Camba-Cambang sebagai gerbang wisata bahari diwilayah kepulauan Kabupaten Pangkep yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapadat Asli Daerah (PAD) dan juga memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat, terutama yang berada di wilayah kepulauan.

3. Pencermatan Kelembagaan

Kepariwisataan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan perannya yang semakin penting dalam pembangunan nasional, ini dapat terlihat dari diperbaharainya undang-undang kepariwisataan (UU no 10 tahun 2009) dan dibuatnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah, strategi pembangunan pariwisata diletakkan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh devisa dari sektor non migas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil

signifikan bagi perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dapat membawa dampak sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kelembagaan mencakup hal-hal yang tidak tertulis seperti aturan adat, norma dan sistem nilai yang dianut masyarakat, dan mencakup sesuatu yang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah. Jadi definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberalisasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu seperti tersebut di atas.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki hak otonomi daerah dalam melaksanakan pembangunannya termasuk bidang kepariwisataan. Sebagai sebuah kabupaten yang berada pada lingkup kewenangannya dan tentunya dengan SKPD yang memiliki keragaman tugas dan fungsi dan sumber daya pariwisata tentunya membutuhkan suatu sinergitas dalam mengimplementasikan pembangunan kepariwisataan. Kajian lingkungan kelembagaan pemerintah sebagai salah satu aspek penting dalam pencermatan lingkungan internal yang akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sampai dengan saat ini belum terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang optimal antar Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Hal ini mutlak untuk dilakukan mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang bersifat multi disiplin dan multi sektor.

Perlunya penyelarasan Visi dan Misi antar lembaga di seluruh pemerintah daerah untuk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga perlu diperhatikan implikasinya yaitu perlunya integrasi antar bidang di kelembagaan pemerintahan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan bidang pariwisata.

Untuk membantu mewujudkan dan menjaga sinergitas antar bidang kelembagaan kepariwisataan maka dibutuhkan adanya suatu badan/organisasi yang dapat memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan proses sinergitas tersebut. Koordinasi dalam kenyataannya bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan, namun dapat dilakukan dengan koordinasi antar seluruh *stakeholders* sehingga tercipta kesamaan visi dan misi aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Badan/organisasi ini merupakan badan independen yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *stakeholders* yang akan menjadi mitra bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan didanai secara kolektif dari seluruh *stakeholders* kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Fasilitas Objek Wisata Pulau Camba-Cambang

Fasilitas pariwisata merupakan salah satu yang menjadi penunjang daya tarik objek wisata Pulau Camba-Cambang terhadap wisatawan untuk datang berkunjung, hal tersebut dilandaskan karena fasilitas pariwisata merupakan sarana

dan prasarana yang disediakan untuk memberikan kenyamanan serta dapat mempermudah wisatawan selama berkunjung di objek wisata Pulau Camba-Cambang.

Adapun berbagai macam fasilitas penunjang bagi para pengunjung yang tersedia di kawasan objek wisata Pulau Camba-Cambang antara lain sebagai berikut :

TABEL 4.2
FASILITAS OBJEK WISATA PULAU CAMBA-CAMBANG

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Gazebo	30
2.	Rumah Penginapan	11
3.	Kolam Mancing	1
4.	Mesin Listrik	1
5.	Kolam Renang	1
6.	Toilet	4
7.	Kamar Bilas	6
8.	Dive Centre	2
9.	Gedung Sport Centre	1
10.	Gedung Pertemuan	1
11.	Dermaga	2
12.	Jalan Setapak	4
13.	Waterboom	1

No	Fasilitas	Jumlah
14.	Mushollah	1
15.	Mesin Air Bersih	1
16.	Panel Surya	1

Sumber : Data Primer, 2018

Dari data tersebut terdapat berbagai macam bentuk fasilitas penunjang bagi pengunjung, yang diharapkan dengan pengadaan fasilitas tersebut dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan terhadap pengunjung, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau masyarakat secara umum untuk datang berkunjung.

5. Jumlah Pengunjung dan Pemasukan Restribusi Objek Wisata Pulau Camba-Cambang

A. Klasifikasi Pasar Wisata

Identifikasi pasar wisata dapat dilakukan dengan mempertimbangkan fakta pasar dan kecenderungannya untuk dapat merasionalisasikan ke dalam penetapan pasar sasaran. Berdasarkan pada data yang ada, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini telah mampu menarik kunjungan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) meskipun masih dalam jumlah yang terbatas.

Berdasarkan hasil pencermatan, pasar wisata yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Wisatawan Lokal

Wisatawan lokal, yaitu penduduk yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga merupakan salah satu pelaku wisata yang berpotensi untuk berkontribusi dalam kunjungan ke daya tarik wisata maupun peran serta dalam *event-event* yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan kepada data statistik Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014, pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk sebanyak 317.110 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk tercatat sebanyak 313.700 jiwa, jumlah tersebut lebih besar 1,1% dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2011.

Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya yang berada di Kecamatan Pangkajene memiliki animo yang cukup tinggi terhadap keberadaan daya tarik wisata, khususnya daya tarik wisata yang dapat menjadi tempat rekreasi keluarga dan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat.

2. Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara (wisnus) merupakan salah satu jenis wisatawan yang dominan melakukan aktivitas wisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan referensi yang disampaikan oleh Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, aktivitas wisata yang dilakukan oleh Wisnus tidak ada musimnya dimana perkembangannya jauh lebih besar dan pesat daripada wisman. Perjalanan wisnus tidak mengenal musim, mereka bisa jalan-jalan di tahun baru, atau kenaikan kelas dan

sebagainya. Yang membuat okupansi hotel penuh, *booking* tiket dan kendaraan penuh itu tidak murni wisatawan, tapi juga orang-orang yang melakukan seminar, musyawarah tingkat nasional maupun tingkat provinsi, dan sebagainya.

3. Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara (wisman) merupakan target utama bagi pembangunan kepariwisataan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kunjungan wisman ke suatu negara atau wilayah diharapkan akan mampu mendatangkan devisa. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada tahun 2013 berjumlah 31 orang. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 64 orang.

B. Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Jumlah pengunjung dari sebuah objek wisata merupakan tolak ukur keberhasilan dan proses pencapaian target pemasukan dari restribusi yang diberlakukan, adapun restribusi objek wisata secara keseluruhan di Kabupaten Pangkep terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mengalami naik turun jumlah pendapatan restribusi, dimana pada tahun 2015 pendapatan disektor wisata melampaui target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.151.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp.200.100.000, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan yang juga tidak mencapai target dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.195.000.000 dan dapat terealisasi

sebesar Rp.138.817.000, dan pada tahun 2017 pendapatan di sektor pariwisata meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya tetapi tidak melampaui target pendapatan yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.207.317.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp.204.850.000. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.3
PENDAPATAN RESTRIBUSI PARIWISATA
KABUPATEN PANGKEP

No	Tahun Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2015	151.000.000	200.100.000
2.	2016	195.000.000	138.817.000
3.	2017	207.317.000	204.850.000

Sumber : DISPENDA Kabupaten Pangkep, 2018

Terkait dengan objek wisata Pulau Camba-Cambang diresmikan pada tanggal 23 november 2015, untuk pelaksanaan penerapan restribusi atau biaya karcis untuk masuk ke objek wisata baru dapat terlaksana pada tahun 2016, mengenai jumlah pengunjung objek wisata Pulau Camba-Cambang dari tahun 2016 terjadi penurunan jumlah pengunjung ditiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 13.929 orang, di tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 9.601 orang. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4**JUMLAH PENGUNJUNG OBJEK WISATA PULAU CAMBA-CAMBANG**

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2016	13.929
2.	2017	9.601

Sumber : DISBUDPAR Kabupaten Pangkep, 2018

Adapun terkait dengan pendapatan restribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang di tahun 2016 total jumlah restribusi sebesar Rp. 31.840.000 melampaui target yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp.20.400.000, pada tahun 2017 total restribusi sebesar Rp.32.350.000 yang juga melampaui target yang telah ditentukan sebesar Rp.32.317.000, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.5**PENDAPATAN RESTRIBUSI PULAU CAMBA-CAMBANG**

No	Tahun	Target	Retribusi
1	2016	Rp. 20.400.000	Rp. 31.840.000
2	2017	Rp. 32.317.000	Rp. 32.350.000

Sumber : DISBUDPAR Kabupaten Pangkep, 2018

Adapun dana hasil restribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang meng dikirim tiap bulannya ke rekening daerah yang menjadi kas daerah Kabupaten Pangkep dan pelaporan data hasil restribusi masuk ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

B. Tata Kelola Objek Wisata Pulau Camba-Cambang

Tata kelola dalam sebuah objek wisata merupakan proses kegiatan dalam menjalankan dan membangun sebuah destinasi wisata yang memiliki pengelolaan yang terarah, sehingga potensi dari sebuah objek wisata dapat dimanfaatkan lebih maksimal dan meningkatkan daya tarik bagi masyarakat untuk datang berkunjung ke objek wisata tersebut. Tata kelola dalam penelitian ini memiliki empat sub bagian, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun hasil penelitian terkait tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pada tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang merupakan langkah awal yang dimana Pulau Camba-Cambang dijadikan sebagai gerbang wisata bahari di Kabupaten Pangkep terkhusus Kepulauan Spermonde yaitu merupakan sebuah gugusan pulau-pulau yang membentang dari takalar hingga ke barru, langkah tersebut berlandaskan terhadap keterbatasan pemerintah daerah dalam membangun fasilitas yang lengkap diberbagai pulau yang memiliki potensi wisata bahari, dimana total keseluruhan pulau yang ada di Kabupaten Pangkep sebanyak 112 pulau dimana 94 diantaranya berpenghuni, dari landasan inilah mengapa pemerintah membangun objek wisata pPulau Camba-Cambang untuk memanfaatkan potensi daerah, adapun Pulau Camba-Cambang dipilih sebagai pusat kegiatan terkait wisata bahari yang ada di Kabupaten Pangkep karena memiliki letak yang strategis dan mudah untuk dijangkau, adapun bentuk

pelaksanaan dalam merealisasi rencana tersebut, telah dilakukan pembenahan pulau dengan membuat pemecah ombak diberbagai sudut dan juga menyediakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan bagi para pengunjung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Seksi DTW KWS Strategis dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep yang berinisial "AN" pada tanggal 27 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa :

“Untuk bentuk perencanaan pengelolaan wisata Pulau Camba-Cambang sendiri yaitu menjadi gerbang wisata Kepulauan Spermonde di Kabupaten Pangkep, dalam upaya merelalisasi hal tersebut dilakukan pembenahan pulau dengan membangun pemecah ombak di berbagai sudut juga penyediaan fasilitas yang lengkap, sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan, hal tersebut dilakukan dikarenakan keterbatasan atau kemampuan daerah dalam membangun fasilitas yang lengkap pada semua pulau yang memiliki potensi wisata, sehingga Pulau Camba-Cambang dijadikan sebagai pusat kegiatan wisata bahari.”
(Hasil wawancara “AN” pada 27 Agustus 2018)

Objek wisata Pulau Camba-Cambang yang direncanakan sebagai gerbang wisata di Kepulauan Spermonde yang nantinya menjadi *base camp* bagi para wisatawan yang akan melakukan wisata bahari di kepulauan Pangkep, jadi segala aktivitas kepariwisataan bahari akan berpusat di objek wisata Pulau Camba-Cambang dimana dalam proses menunjang hal tersebut, salah satu langkah pemilihan pengembangan wisata bahari yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep telah melakukan survey potensi wisata di 10 pulau yang mewakili gugusan pulau Spermonde termasuk Pulau Camba-Cambang, yang dimaksud disini yang memiliki potensi daya tarik wisata, adapun pulau-pulau lain yang telah di survey yaitu Pulau Sabutung, Pulau Saugi, Pulau Badi, Pulau

Cengkeh, Pulau Pala, Kepulauan Saelu, Pulau Kapoposan, Pulau Pajenekang, dan wisata bahari Saranti. Dimana fungsi di kelolanya Pulau Camba-Cambang yaitu memberikan daya tarik bagi para wisatawan dan juga membuka peluang wisata bahari di berbagai pulau yang ada di Kabupaten Pangkep terutama pulau-pulau yang telah dilakukan survey sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Subag Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “AK” pada tanggal 27 Agustus 2018, yakni :

“Pulau Camba-Cambang sendiri direncanakan sebagai gerbang wisata di Kepulauan Spermonde dimana akan menjadi *base camp* bagi para wisatawan untuk menikmati wisata bahari di berbagai pulau spermonde dimana kami juga telah melakukan survey di 10 pulau terdekat yang mewakili karakter spermonde yang memiliki potensi wisata guna mewujudkan rencana awal Pulau Camba-Cambang sebagai gerbang wisata bahari.”

(Hasil wawancara “AK” pada 27 Agustus 2018)

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat yang berada di Pulau Saugi “M” yang dillakukan pada tanggal 11 September 2018 menyatakan bahwa :

“Kalau yang saya tau Pulau Camba-Cambang itu dijadikan pusat wisata pulau yang dimana telah dibangunmi berbagai macam fasilitas untuk kebutuhan pengunjung yang sudah dibangun sama pemerintah.”

(Hasil wawancara “M” pada 11 September 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan tentang bentuk perencanaan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yaitu sebagai gerbang wisata dan juga pusat dari kegiatan wisata bahari yang ada di Kabupaten Pangkep terkhusus Kepulauan spermonde, hal tersebut dilakukan karna keterbatasan daerah dalam membangun

objek wisata pulau yang memiliki fasilitas lengkap di seluruh pulau yang memiliki potensi wisata bahari.

Adapun langkah yang telah dilakukan dalam upaya merealisasi rencana tersebut telah dilakukan pembenahan pulau dengan membangun pemecah ombak diberbagai sudut pulau juga membangun dan menyediakan fasilitas yakni terkait sarana dan prasarana penunjang bagi para pengunjung dan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri telah melakukan survey 10 pulau satelit terdekat dari Pulau Camba-Cambang yang mewakili karakter Spermonde yang memiliki potensi wisata bahari yang nantinya Pulau Camba-Cambang menjadi *base camp* bagi para wisatawan untuk dapat menikmati objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Sarina dan Mardalena (2012) yang mengemukakan bahwa Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Proses perencanaan tidak terlepas dari pencapaian target yang diinginkan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana masyarakat terkhusus yang bertempat tinggal disebelah Pulau Camba-Cambang dapat membuka usaha di wilayah objek wisata tentang penyediaan kebutuhan pengunjung selama berada di Pulau Camba-Cambang seperti berjualan, warung makan, dan penjualan cendera mata. Dari segi penyediaan jasa, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dapat menjadi penyedia alat transportasi laut yang

dapat mengantar para pengunjung menuju ke kawasan Pulau Camba-Cambang. Untuk dampak bagi pemerintah daerah terkait tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu dari hasil redistribusi pengunjung akan masuk ke kas daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang, maka Subag Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “AK” pada tanggal 27 Agustus 2018 mengemukakan bahwa :

"Terkait dengan dampak yang diberikan dari pengelolaan wisata Pulau Camba-Cambang itu berhubungan langsung dengan masyarakat dan juga pemda sendiri, dalam konteks masyarakat dapat membuka usaha maupun jasa, apa lagi yang bertempat tinggal di sebelah Pulau Camba-Cambang dapat berjualan, membuka warung makan dan juga penjualan cenderamata. Nah masyarakat juga yang berprofesi sebagai nelayan dapat mengangkut penumpang yang dijadikan sebagai alat transportasi menuju lokasi wisata. Dari segi pemerintah sendiri dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah yang hasil redistribusinya masuk ke kas daerah."
(Hasil wawancara “AK” pada 27 Agustus 2018)

Lebih lanjut dalam implementasi dari perencanaan pengelolaan objek wisata terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu terbukanya berbagai macam peluang usaha dan juga penyediaan jasa, sehingga dampak yang ditimbulkan mengarah ke hal positif dimana secara tidak langsung terjadi proses pemberdayaan masyarakat contohnya saja masyarakat dapat membuka usaha di objek wisata dan para nelayan dapat menyediakan transportasi menggunakan kapal yang mereka miliki yang rata-rata dapat mengangkut 7 sampai 8 orang

sekali jalan dengan kisaran tarif Rp.150.000 sampai Rp.200.000. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan camat Liukang Tupabburung Utara “HM” pada tanggal 11 september 2018 yang menyatakan bahwa :

“Keberadaan wisata Pulau Camba-Cambang terhadap masyarakat sendiri terutama yang bertempat tinggal di pulau yang berdekatan dengan kawasan wisata Pulau Camba-Cambang, dapat memanfaatkan peluang usaha terkait penyediaan kebutuhan para pengunjung selama berada di kawasan wisata. Juga masyarakat sendiri yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan dapat menggunakan kapal mereka sebagai angkutan transportasi ke wisata Pulau Camba-Cambang.”
(Hasil wawancara “HM” pada 11 september 2018)

Salah seorang pengunjung berpendapat bahwa bentuk pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang memiliki potensi bahari yang berdampak baik bagi masyarakat, hanya saja yang dominan yang memanfaatkan usaha di objek wisata Pulau Camba-Cambang hanya penduduk yang berasal dari Pulau Saugi, kurangnya minat masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di pulau lain yang berdekatan dengan objek wisata Pulau Camba-Cambang untuk memanfaatkan peluang usaha. hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan pengunjung objek wisata “KG” pada 16 september 2018 yang menyatakan bahwa :

“Kalau dampaknya bagi masyarakat saya perhatikan sekitar bagus karna dapat membuka peluang usaha dan jasa bagi masyarakat tapi saya sudah tanya dengan beberapa penjual dan ternyata yang biasa menjual disini hanya penduduk yang berasal dari Pulau Saugi, saya tidak tau kenapa padahal ada beberapa pulau yang sangat dekat tapi mereka tidak memanfaatkan.”
(Hasil wawancara “KG” 16 september 2018)

Adapun perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang tentang terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang berinisial "JM" mengemukakan bahwa dalam pendapatan redistribusi di sektor pariwisata terkhusus Pulau Camba-Cambang dua tahun terakhir memberikan pemasukan yang berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan dari target yang telah ditentukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2018, yaitu :

"Dilihat dari dua tahun terakhir sejak diterapkannya redistribusi dari wisata Pulau Camba-Cambang itu telah melampaui target yang telah ditentukan, yang dimana pada tahun 2016 ke tahun 2017 target dari redistribusi Pulau Camba-Cambang selalu melampaui target yang telah di tentukan, hal tersebut memberikan keberadaan wisata Pulau Camba-Cambang dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pangkep." (Hasil wawancara "JM" pada 30 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari objek wisata Pulau Camba-Cambang sebagai gerbang wisata bahari sekaligus menjadi pusat dari wisata bahari yang dimana dalam perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini masyarakat terutama masyarakat yang berada di pulau sekitar objek wisaa Pulau Camba-Cambang dapat memanfaatkan peluang usaha atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh para wisatawan, hanya saja masih kurangnya masyarakat untuk membuka usaha di wilayah objek wisata Pulau Camba-Cambang karna hanya di dominasi oleh masyarakat yang berasal dari Pulau saugi, adapun dari perencanaan ini hasil dari

retribusi objek wisata masuk ke rekening daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Muntasib et al. (dalam Handini Widiyanti 2016:7), menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata merupakan suatu bentuk hubungan antara pelaku pariwisata, konsumen pariwisata, pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki sebuah hubungan terkait pariwisata, dimana Sisi permintaan juga berkembang keragaman permintaan sehingga perlu disiapkan perencanaan yang memahami trend dunia, sekaligus mampu membuat inovasi sebagai sesuatu yang unik dan khas Indonesia.

2. Pengorganisasian

Adapun hasil penelitian terkait dengan pengorganisasian dalam objek wisata Pulau Camba-Cambang yaitu dalam proses tata kelola objek wisata dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, dimana bentuk pembagian peran dalam pengelolaan sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam lingkup struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adapun yang bertugas di objek wisata merupakan pegawai honorer Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak dua orang yang merupakan masyarakat Pulau Saugi yang berdekatan dengan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang memiliki tugas sebagai , hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Seksi DTW KWS Strategis dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep yang berinisial "AN" pada tanggal 27 Agustus 2018, mengemukakan bahwa :

“Dalam pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang itu dikelola langsung oleh disbudpar, yang dimana tiap-tiap bidang yang ada dilingkup disbudpar memiliki perannya masing-masing. Adapun dua orang yang bertugas dilapangan yaitu pegawai honorer yang juga merupakan masyarakat Pulau Saugi yang berdekatan dengan objek wisata yang bertugas sebagai penjaga karcis restribusi dan penjaga kebersihan.”
(Hasil wawancara “AN” pada 27 Agustus 2018)

Lebih lanjut Seksi Subag Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “AK” mengemukakan bahwa dalam tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana dalam proses pengelolaannya yang bertugas di objek wisata merupakan pegawai honorer dengan mekanisme penggajian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sumber dana penggajian berasal dari APBD Kabupaten Pangkep dengan tolak ukur penggajian berdasarkan kehadiran dan tingkat kinerja dengan besaran gaji yaitu Rp.700.000 sampai 1.000.000 ditiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Agustus 2018, yakni :

“Untuk pengelolaannya itu ditangani oleh instansi kami, adapun yang bekerja dilapangan merupakan pegawai honorer yang bertugas sebagai penjaga tiket dan penjaga kebersihan adapun mekanisme penggajiannya itu lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berasal dari APBD yang tolak ukur penggajiannya berdasarkan kehadiran dan tingkat kinerja dengan kisaran gaji tujuh ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah per bulan.”
(Hasil wawancara “AK” pada 27 Agustus 2018)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dengan penjaga tiket restribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang, dimana dalam proses pengelolaan di objek wisata ditangani oleh dua orang pegawai honorer Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep sebagai penjaga restribusi dan penjaga kebersihan objek

wisata yang keduanya merupakan pegawai honorer yang berasal dari pulau terdekat dengan objek wisata yakni Pulau saugi, hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo, 2017:23) Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antarpersonalia, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh Pengambilan Kebijakan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun hasil wawancara dengan penjaga tiket redistribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang “A” pada tanggal 16 September 2018, yang menyatakan bahwa :

“Kalau disini yang jaga ada dua orangji yang juga merupakan pegawai honorer DISBUDPAR, saya sebagai penjaga tiket dan yang satunya lagi itu sebagai penjaga kebersihan pulau. Saya sama penjaga kebersihannya itu tinggal di pulau Saugi yang disebelahnya ini Pulau Camba-Cambang.” (Hasil wawancara “A” pada 16 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan pengorganisasian dalam proses pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang merupakan aset daerah Kabupaten Pangkep yang di kelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana dalam proses pengelolaannya yang bertugas di objek wisata Pulau Camba-Cambang merupakan pegawai honorer sebagai penjaga tiket redistribusi dan penjaga kebersihan pulau yang berasal dari Pulau Saugi. hal tersebut menjadi kurang efektif, mengingat luas dari Pulau Camba-Cambang sekitar 1,5 hektare hanya dijalankan oleh dua orang tenaga kerja. Hal tersebut bertolak belaka dengan pernyataan dari Sarina dan Mardalena (2012) yang menyatakan bahwa dalam proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah

dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh.

3. Pengarahan

Pengarahan merupakan tahap pemberian petunjuk atau pedoman pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat menjalankan program guna dapat dijalankan oleh setiap pihak yang bersangkutan dan juga menjadi tahap dimana semua pihak yang bersangkutan dapat memberikan proses memotivasi agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kemampuan.

Proses pengarahan menjadi suatu yang sangat penting, guna terjadi penerapan program yang sesuai konsep yang akan diterapkan di objek wisata Pulau Camba-Cambang, dimana dapat terjalin komunikasi yang baik dan terarah antar semua *stakeholders* yang terlibat. bahwasanya dalam proses pengarahan implementasi perencanaan peran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting dalam menjalin komunikasi kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam menyukseskan pengembangan perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang, yakni Bupati, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan non-SKPD yang dimana hasil dari komunikasi tersebut akan diarahkan lagi ke pegawai dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo, 2017:23) Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan

kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Seksi DTW KWS Strategi dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep “AN” pada tanggal 27 Agustus 2018, yang

“Dalam proses pengarahannya penerapan program Kepala Dinas menjadi sosok yang memberikan arahan berdasarkan hasil dalam melakukan komunikasi kepada setiap *stakeholders* yaitu Bupati, SKPD dan non-SKPD terkait dalam proses pelaksanaan bentuk perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang nantinya kepala dinas akan memberikan arahan yang akan dijalankan oleh disbudpar sendiri.
(Hasil wawanca “AN” pada tanggal 27 Agustus 2018)

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oleh Camat Liukang Tupabbiring Utara dimana dalam proses pengelolaan objek wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dalam mempertimbangkan berbagai macam program dan juga pembangunan pengembangan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang ingin dijalankan dalam upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep lebih khusus lagi di wilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.

“Kalau komunikasi dengan pihak dinas itu memang ada sebelumnya apa lagi dalam proses pembangunan awal dan juga biasanya terkait pelaksanaan program dari wisata tersebut”.
(Hasil wawancara “HM” pada 11 september 2018)

Lebih lanjut Subag. Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep “AK” menyatakan bahwa, dalam proses ini Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bentuk arahan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang ke setiap pegawai berdasarkan posisi bidang atau jabatan yang mereka tangani. Hal ini sesuai dengan wawancara pada tanggal 27 Agustus 2018, yang mengemukakan :

“Untuk pengarahannya sendiri, Kepala Dinas memiliki peran inti dalam memberikan arahan dalam pengelolaan wisata Pulau Camba-Cambang ke setiap pegawai yang berada di dalam instansi disbudpar sendiri berdasarkan perannya masing-masing sesuai bidang yang mereka tangani.”
(Hasil wawancara “AK” pada tanggal 27 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pengarahannya kepala dinas memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan komunikasi terhadap semua pihak yang terkait dalam proses pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang, adapun peran kepala dinas yaitu menjalin komunikasi dengan seluruh *stakeholders* sehingga dapat terjalin komunikasi yang terarah dan dapat menjalankan segala fungsi atau perannya masing-masing dalam mencapai target yang diinginkan, proses komunikasi dengan *stakeholders* dalam menyukseskan pengembangan perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang, yakni Bupati, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan non-SKPD yang dimana hasil dari komunikasi tersebut akan diarahkan lagi ke pegawai dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep. Hal ini sejalan dengan pernyataan dengan Sarina dan Mardalena (2012) yang menyatakan bahwa pengarahannya merupakan suatu proses implementasi program agar dapat dijalankan

oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

4. Pengendalian

Dalam tata kelola proses pengendalian dilakukan agar seluruh rangkaian terkait perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan terlaksana sesuai dengan apa yang telah di konsepskan sebelumnya, tahap ini menjadi proses pengawasan dari kinerja semua pihak yang bersangkutan. Dalam pengendalian dalam konteks objek wisata menjadi bahan evaluasi terhadap proses pengelolaan yang berlangsung.

Pada proses pengendalian tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terkait dengan kendala maupun kemajuan dengan berbagai pertimbangan mengenai sarana dan prasarana, alat transportasi bagi para pengunjung, dan terutama pada tingkat jumlah pengunjung yang ada sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di lokasi wisata dapat diketahui guna meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan sehingga jumlah pengunjung dapat ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara Seksi DTW KWS Strategis dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep yang berinisial "AN" pada tanggal 27 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa :

“Terkait pengendalian objek wisata Camba-Cambanh kita disini melakukan proses evaluasi dari data yang ada di lapangan, sehingga kendala-kendala yang ada di lokasi wisata yang dapat mempengaruhi

daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung dapat diketahui dan memberikan solusi guna meningkatkan jumlah pengunjung.”
(Hasil wawancara “AN” pada tanggal 27 Agustus 2018)

- a. Lebih lanjut, Subag Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “AK” pada tanggal 27 Agustus 2018 mengemukakan bahwa proses pengendalian dalam pengelolaan wisata Pulau Camba-Cambang dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi berdasarkan data terkait jumlah pengunjung objek wisata Pulau Camba-Cambang yang masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dimana pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga selalu mengirim perwakilan untuk datang meninjau proses pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang. hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo, 2017:23) Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan sering juga disebut kontrol, penilaian, penilikan, monitoring, supervisi dsb. Tujuan utama pengawasan adalah agar dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan menghindarkan terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dapat diartikan sebagai pengendalian. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

“Proses pengendaliannya dilakukan dengan cara melakukan rapat evaluasi terkait proses peningkatan jumlah pengunjung objek wisata. Yang dimana dari pihak kami selalu mengirim perwakilan untuk mengecek permasalahan apa saja yang ada di lokasi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya.”

(Hasil wawancara “AK” pada tanggal 27 Agustus 2018)

Hal tersebut didukung oleh wawancara dengan pegawai honorer yang bertugas di objek wisata Pulau Camba-Cambang dimana setiap laporan data pengunjung beserta hasil restribusi akan di laporkankan dan menjadi salah satu bahan rujukan dalam melakukan evaluasi terkait perkembangan dari objek wisata yang berguna untuk mengkaji kendala-kendala ataupun pendorong peningkatan jumlah pengunjung sehingga efektifitas dari pengelolaan objek wisata dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, adapun dari hasil pengamatan di lokasi penelitian terkait dengan data resribusi dan data pengunjung masih kurang detail dalam mengolah data, dimana dalam data restribusi tidak mencantumkan perbedaan biaya restribusi yang memiliki dua kategori dengan biaya yang berbeda dimana anak-anak dikenakan tarif sebesar Rp.3.000 dan orang dewasa sebesar Rp.5.000, dengan tidak adanya data pembagian biaya restribusi data pengunjung dan data restribusi tidak dapat menjelaskan secara detail terkait keselarasan antara jumlah pengunjung dengan pendapatan biaya restribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan pegawai honorer yang merupakan penjaga tiket restribusi objek wisata Pulau Camba-Cambang “A” pada tanggal 16 September 2018, yang menyatakan bahwa :

“Jumlah pengunjung sama hasil dari restribusinya saya yang setor langsung ke kantor ditiap minggunya tapi terkadang adaji orang kantor yang datang disini mengecek langsung.”

(Hasil wawancara “A” pada 16 September 2018).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep yakni dengan cara melakukan evaluasi dari laporan oleh pihak pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan terkait kemajuan dan juga kendala-kendala yang ada di lokasi wisata yang dapat mempengaruhi daya tarik para wisatawan untuk datang berkunjung guna dapat melakukan pelaksanaan pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yang lebih baik lagi untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata Pulau Camba-Cambang hanya saja dalam penyajian data kurang detail dimana data hasil restribusi tidak dikelompokkan berdasarkan besaran biaya karcis restribusi yang besaran biaya karcis dikelompokkan berdasarkan usia sehingga bahan rujukan dalam evaluasi kurang maksimal dikarenakan proses perbandingan restribusi dan jumlah pengunjung menjadi kurang maksimal, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari Sarina dan Mardalena (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Bentuk tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang, yaitu :
 - a. Perencanaan objek wisata Pulau Camba-Cambang yaitu sebagai gerbang wisata kepulauan spermonde dan menjadi pusat bagi kegiatan wisata bahari di Kabupaten Pangkep, adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :
 1. Melakukan pembenahan Pulau Camba-Cambang dengan membangun pemecah ombak di berbagai sisi.
 2. Membangun dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang bagi para pengunjung.
 3. Melakukan survey ke 10 pulau satelit yang mewakili karakter Spermonde dalam proses pengembangan wisata bahari dimana objek wisata Pulau Camba-Cambang menjadi *base camp* bagi para wisatawan yang akan menikmati keindahan laut di Kepulauan Spermonde.

- b. Bentuk pengorganisasian yang dilakukan dalam proses pelaksanaan perencanaan, yaitu :
1. Objek wisata Pulau Camba-Cambang di kelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep
 2. Petugas objek wisata Pulau Camba-Cambang merupakan pegawai honorer sebanyak dua orang yang bekerja sebagai penjaga restribusi dan penjaga kebersihan
- c. Pada tahap pengarahannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran penting dalam proses tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang, yaitu :
1. Melakukan komunikasi kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Pulau Camba-Cambang, yakni Bupati, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan non-SKPD dalam proses pelaksanaan pengelolaan objek wisata.
 2. Memiliki peran dalam pemberian arahan pelaksanaan bentuk perencanaan pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang kepada seluruh pegawai dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep.
- d. Proses pengendalian dalam pengelolaan objek wisata Pulau Camba-Cambang dengan melakukan evaluasi dengan laporan dan data tentang kendala atau permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung, hanya saja

penyajian data redistribusi kurang detail dikarenakan tidak adanya penjelasan data terkait dengan pengelompokkan sesuai besaran biaya karcis yang berdasarkan kategori anak dan dewasa.

B. Saran

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tata kelola objek wisata Pulau Camba-Cambang dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pangkep, yaitu :

1. Perlu penambahan jumlah pekerja di kawasan objek wisata, dimana sekarang hanya ada dua yakni sebagai penjaga karcis dan penjaga kebersihan sehingga kurang maksimalnya perawatan berbagai macam fasilitas penunjang bagi para wisatawan.
2. Dalam pengelolaan data lebih dilengkapi seperti data redistribusi yang tidak menjelaskan kategori tiket sehingga penyampain data terlihat tidak sinkron dengan data jumlah pengunjung dimana dalam hal ini terdapat perbedaan harga antara tiket dewasa dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hardian Pamungkas. 2017 *Studi Tentang Manajemen Prasarana Olahraga di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang* : Jurnal Sport Science, Volume 7, No. 2, 2017.
- Anjelina, Lusita. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Lampung.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1 (2010): 46-62.
- Comce, Hasan, dkk. 2017 *Komunikasi Wali Kelas Dengan Orang Tua Siswa dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Sma Semesta Bilingual Boarding School Semarang* : Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 5, No. 4, November 2017.
- Darmawati, Dwita. 201 *Studi Eksplorasi tentang Tata Kelola Zakat Infak dan Sedekah (Zis)* : Performance, Volume 24 Nomor 2, 2017.
- Hasanah, Mauizatul. *PENGLOLAAN PARIWISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)*. 2017. PhD Thesis.
- Herat, Rizki Andini. 2015. *Peran Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai*. E-jurnal Acta Diurna, Volume IV, No. 4, 2015
- Heriansah dan Fathuddin. 2014. *Upaya Pengembangan Usaha Alternatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Pulau di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan* : Jurnal Balik Diwa, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2014.
- Itamar, Hugo. 2016. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Kanuna, Resky Sirupang. 2014. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Hasanuddin

- Koroy, Kismanto. dkk. 2017 *Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil Di Pulau Sayafi Dan Liwo, Kabupaten Halmahera Tengah* : Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Volume 8 No. 1, Mei 2017.
- Koroy, Kismanto. dkk. 2017 *Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil Di Pulau Sayafi Dan Liwo, Kabupaten Halmahera Tengah* : Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Volume 8 No. 1, Mei 2017.
- Masruri, Anis, dkk. 2016. *Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan Ptain Studi Kasus di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* : Jurnal Pembangunan Pendidikan, Volume 4, No 1, Juni 2016.
- Masruri, Anis, dkk. 2016. *Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan Ptain Studi Kasus di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* : Jurnal Pembangunan Pendidikan, Volume 4, No 1, Juni 2016
- Nawawi, A. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 103-109.
- Nurdyansyah., & Andiek, W. (2017). *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*. Penerbit Nizamia Learning Center
- Nurjanah, Riani. 2012. *Studi Persepsi Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan terhadap Kunjungan Wisata di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu* : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 23 No. 2, Agustus 2012.
- Purnomo, Dhani Eko Setyo. 2013. *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Obyek Wisata di Surakarta Menggunakan Metode Fuzzy Tahani*. Universitas Stikubank Semarang
- Purnomo, Dhani Eko Setyo. 2013. *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Obyek Wisata di Surakarta Menggunakan Metode Fuzzy Tahani*. Universitas Stikubank Semarang
- Radu, L., Prianto, A. L., & Tahir, M. M. (2012). *GOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2).
- Rani, D. P. M. 2014. *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)*. Jurnal Politik Muda, 3(3), 412-421.

- RIYADI, Slamet, et al. Daya Saing Daerah Tujuan Wisata (Studi Kasus Rendahnya Daya Saing Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 2012, 10.3: 502-531.
- Rokhmana, Siti Nila (2012) *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- Rutanaji, Dicky, dkk. 2017. *Iso 27001 Sebagai Metode Alternatif Bagi Perancangan Tata Kelola Keamanan Informasi (Sebuah Usulan Untuk Diterapkan di Arsip Nasional Ri)*.
- Samudra, Krishna, dkk. 2010. *Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wisata Bahari di Kepulauan Kapoposan Kabupaten Pangkep* : Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Volume 1. No 1, November 2010.
- Sari, D. K., & SUSILOWATI, I. (2011). *Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Sarina dan Mardalena. 2012. *Pengantar manajemen*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Silalahi, Ulber. 2015. *Asas Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama
- Suhardi. 2016. *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suharto, Bambang, 2011. *Tata Kelola Organisasi Destinasi Candi Borobudur* : Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Volume 12, No. 1, Juni 2011
- Tahir, Qaharuddin, dkk. 2014. *Masjid Kampus Sebagai Media Komunikasi Aktivis Dakwah dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa* : Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 3, No. 3 Juli – September 2014.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2012. *Pengantar Industri Pariwisata*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Wahyono, R. Erdianto Setyo. 2012 *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia* : Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 1 No. 12, 2012.
- Widiyanti, Handini. 2016. *Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor.

Widiyanti, Handini. 2016. *Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor.

Widyasmi, Kartika, Asnawi Syarbini, and Yeni Widyastuti. 2012 *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak*. Diss. FISIP Untirta, 2012.



RIWAYAT HIDUP



ZUL FADLI. Lahir di Gentung Kabupaten Pangkep pada tanggal 27 September 1996, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ansyar (almarhum) dan Hariyati. Mulai menjejak dunia pendidikan formal di TK Pertiwi Kecamatan Bungoro (2001-2002), SDN 3 Sambung Jawa Kecamatan Bungoro (2002-2008), SMPN 1 Bungoro (2008-2011), SMAN 1 Bungoro (2011-2014), dan tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama menempuh pendidikan di UNISMUH Makassar, saya berdomisili di Jl. Sultan Alauddin 2 lorong 2, Makassar. (email: zulfadliansyar@gmail.com); (Instagram: [zulfadliansyar](#)); (You tube: [Pakkutanang](#))

